

KORUPSI DALAM PATOLOGI SOSIAL : SEBAB, AKIBAT DAN PENANGANANNYA UNTUK PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Ida Bagus Ketut Weda, S.H.,M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

(bagusweda@ymail.com)

Abstract

One of the negative effects from the development is corruption criminal act. Indonesia is one of high rate corruption country. Almost all districts have corruption case and most of departments in this country have indication to corrupt. In other words, corruption in Indonesia is such contagious disease. If such condition still keeps going, it will obstruct the development and threaten the integration of this country, because corruption has implications to all sectors in our life, such as economic, politic, social and culture, and defence and security. Based on information above, it needs some efforts to fight against corruption criminal act, for example improving law instrument in institution regulation, the doer of law, and the activeness and the involvement of society. Further, the improvement of the morality is also important because morality is the principle from the mystically enlightened soul to support good government.

Key words : *Corruption, Development, Social*

Abstrak

Salah satu dampak negatif dari pembangunan adalah tindak pidana korupsi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Hampir semua kabupaten memiliki kasus korupsi dan sebagian besar departemen di negeri ini memiliki indikasi untuk korup. Dengan kata lain, korupsi di Indonesia adalah penyakit menular. Jika kondisi seperti itu masih terus terjadi, maka akan menghambat pembangunan dan mengancam integrasi negara ini, karena korupsi memiliki implikasi untuk semua sektor dalam kehidupan kita, seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Berdasarkan informasi di atas, perlu beberapa upaya untuk memerangi tindak pidana korupsi, misalnya memperbaiki instrumen hukum dalam peraturan lembaga, pelaku hukum, dan keaktifan dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya, peningkatan moralitas juga penting karena moralitas adalah prinsip dari jiwa yang bersih untuk mendukung pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : Korupsi, Pembangunan, Sosial

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak saja akan menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan lainnya seperti kriminalitas dalam bentuk korupsi. Tindak pidana korupsi adalah suatu dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan

yang melibatkan suatu penyalahgunaan secara melawan hukum dari kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) maupun kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) dimana pengaruh dari kekuasaan ekonomi dari para konglomerat sangat erat kaitannya dengan kekuasaan umum yang melekat

kedudukan pejabat umum, bentuk kejahatan struktural ini yang memasukkan format korupsi sebagai kejahatan yang teroganisir¹. Korupsi di Indonesia sudah sedemikian mencengangkan. Berdasarkan data *Transparency Internasional* 2007 Indonesia menempati peringkat 36 negara paling korup di dunia. IPK pada tahun 2007 adalah 2,3, IPK tersebut adalah persepsi korupsi disektor publik pada 180 negara. Nilai IPK ini skalanya dari nol sampai dengan sepuluh. Nol mengindikasikan persepsi terhadap korupsi yang tinggi, sedangkan sepuluh mengindikasikan tingkat korupsi yang rendah. Sementara berdasarkan *survey political and economic risk consultancy (PERC)* pada Januari 2008 pada 13 negara di Asia, Indonesia berada di posisi ketiga Negara terkorup dengan nilai 7,98. Survey tersebut sengaja tidak memasukkan Myanmar dan Bangladesh yang terkenal sangat korup².

Hampir tiap daerah di Indonesia memiliki kasus korupsi, dan hampir semua lembaga/institusi di republik ini terindikasi korupsi, mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang *notabene* pengawas dari *law enforcement*, sehingga saat ini kata korupsi seperti *keyword* di

media massa negeri ini karena kasus dan ulasan-ulasan tentang korupsi yang muncul setiap hari. Kasus korupsi mantan Bupati Kutai Kartanagara Syaukani terkait pembebasan tanah untuk pembangunan bandara Loa Kulu yang menyeret juga Bupati Minahasa Utara Vonnie AP, kasus Sekretaris Daerah Bintan Azirwan terkait dugaan suap anggota DPR-RI Al- Amin Nasution mengenai alih fungsi hutan lindung dan kasus Walikota dan Wakil Walikota Medan terkait kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sedikit kasus yang mewakili adanya indikasi korupsi di dalam tubuh pelaksana pemerintahan (Eksekutif). Sementara kasus suap lebih mendominasi penyebab terjadinya dugaan korupsi di kalangan lembaga legislatif. Dugaan menerima suap kepada anggota DPR-RI Yusuf Emir Faishal terkait alih fungsi 600 hektar hutan bakau di tanjung api-api, Bulyan Royan terkait dugaan suap untuk memuluskan proyek kapal patroli Departemen Perhubungan, dan kasus penyalahgunaan aliran dana Bank Indonesia dengan tersangka Hamka Yandhu yang menyeret semua anggota komisi IX periode 1999-2004 termasuk di dalamnya Paskah Suzetta mantan Menteri

¹ Seno Adji Indriyanto, 2007, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, hal 24.

² Suryadharma Ali, 25 Juni 2008, *Membangun Parpol Anti Korupsi*, Seputar Indonesia.

Perencanaan Pembangunan (PPN/Kepala Bappenas) dan M.S Ka'ban mantan menteri kehutanan. Sementara indikator korupsi di tubuh lembaga Yudikatif dapat dilihat melalui Kasus Jaksa Urip Tri Gunawan. Berdasarkan gambar situasi korupsi yang terjadi, bisa diambil kesimpulan bahwasannya korupsi di Indonesia sudah seperti sebuah penyakit (patologi) yang sudah menyebar dan dapat membahayakan bagi kelangsungan pembangunan di negeri ini.

Secara etimologis, kata patologi berasal dari kata *Pathos* yang berarti *disease* atau penderitaan atau penyakit dan *Logos* yang berarti berbicara tentang, atau pembahasan tentang atau ilmu tentang sesuatu. Jadi, patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang penyakit atau ilmu tentang penyakit. Maksud dari pengertian di atas bahwa patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang asal usul dan sifat-sifatnya penyakit. Konsep ini bermula dari pengertian penyakit di bidang ilmu kedokteran dan biologi yang kemudian diberlakukan pula untuk masyarakat, karena dalam pandangan sosiolog masyarakat itu tidak berbeda dengan organisme atau biologi sehingga dalam kehidupan bermasyarakat juga dikenal dengan konsep penyakit. Sedangkan kata sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia

yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi yakni individu atau manusia yang saling berinteraksi atau berhubungan secara timbal balik, dalam konsep terbaru hubungan yang dimaksud disini bukan manusia atau manusia dalam arti fisik saja tetapi, dalam arti yang lebih luas yaitu *community* atau masyarakat. Maka pengertian dari patologi sosial adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit” disebabkan oleh faktor-faktor sosial atau Ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakekat adanya manusia dalam hidup masyarakat³.

Tulisan ini mencoba mendeskripsikan tentang mewabahnya penyakit korupsi yang berkorelasi dengan instrument hukum dan rendahnya moral pelaku korupsi sebagai bagian dari masyarakat (bangsa) Indonesia, sehingga dengan mengetahui adanya kelemahan dalam suatu instrumen hukum dan mengetahui seberapa pentingnya faktor moral dalam persoalan korupsi, tindakan preventif bisa dilakukan untuk menekan terjadinya korupsi dimasa yang akan datang dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang bersih sebagai modal utama pembangunan.

³ Taufiq Winarno, 2011 Sejarah Patologi Sosial diakses 26 November 2013 dari <http://www.wikipedia.com>.

PEMBAHASAN

A. Korupsi Dan Instrumen Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam *The Lexicon Webster Dictionary*⁴. Penggunaan istilah tindak yang tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman sering dipakai serangkai dengan kata korupsi. Kata tindak lebih pendek dari perbuatan, tapi tindak tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau tingkah jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai ditindak⁵. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan

moralitas, karena lambat laun perbuatan itu seakan menjadi sebuah budaya.

Persoalan korupsi yang illegal (melawan hukum) selalu ditujukan kepada mereka yang memegang jabatan umum (*public office*) ataupun kepada mereka yang mempunyai posisi khusus dalam kehidupan publik. Bagi Indriyanto perbuatan penerimaan komisi oleh pejabat adalah memenuhi unsur melawan hukum secara material/sebagai perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat, karena penerimaan komisi akan selalu dikaitkan dengan jabatan/kedudukan dari si pejabat dalam menjalankan kekuasaan/kewenangannya, sehingga tidaklah mungkin komisi diberikan kepada pegawai rendahan yang tidak ada sangkut paut dengan jabatan/kedudukan. Penerimaan komisi oleh pejabat itulah yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum secara material, artinya meskipun perbuatan itu tidak memenuhi rumusan pelanggaran suatu Wet/undang-undang tertulis, tetapi penerimaan komisi oleh pejabat merupakan perbuatan yang dianggap tercela/menyinggung rasa sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Korupsi sudah dianggap sebagai kejahatan yang sudah luar biasa/*ordinary crime* karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (*high level economic*) dan birokrasi kalangan atas

⁴ Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 52.

⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal 32.

(*high level beurocratic*) baik birokrat ekonomi maupun pemerintah. Selain itu kehendak adanya pemberantasan perbuatan itu nyata-nyata terkait dengan kepentingan kekuasaan yang mungkin melibatkan para birokrasi tersebut sehingga menjadi bentuk yang *untouchable by the law*, oleh karena itu korupsi memerlukan penanganan yang luar biasa (*extra ordonary enforcement*).

Dalam kongres PBB ke 6 mengenai *The Prevention of crime and The Treatment of offenders* pada tahun 1980, maka tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai jenis tindak pidana yang sangat sukar dijangkau oleh hukum (*offences beyond the each of the law*). Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum relatif tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan menghadapi jenis tindak pidana ini karena 2 alasan, yaitu: 1. Kedudukan ekonomi atau politik yang kuat dari si pelaku (*the high economic or political status of their perpretators*), 2. Keadaan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut (*the circumstances under which they had been comitted werw such as the decrease the likelihood of their reported and the prosecuted*)⁶.

Hukum merupakan media yang dapat menekan terjadinya penyimpangan dalam perilaku masyarakat terhadap korupsi, karena hukum dapat berfungsi sebagai kontrol sosial dalam mengatur pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk dapat menjalankan fungsinya hukum membutuhkan instumen (alat) berupa peraturan perundang-undangan, institusi hukum, dan lembaga penegak hukum (pengadilan). Dalam tindak pidana korupsi yang menjadi institusi hukumnya adalah: Jaksa, hakim, polisi, dan komisi pemberantasan korupsi. Sementara pengadilan dalam tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Umum dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Titik tolak perkembangan hukum pidana menitikberatkan pada konsep kepentingan keseimbangan antara pelaku (*dader*) dan perbuatan (*daad*), bahkan dalam perkembangan hukum pidana modern, keseimbangan itu tidak hanya meliputi antara pelaku dan perbuatannya, tetapi adanya keseimbangan kepentingan itu dengan memperhatikan semua aspek, yaitu pelaku, korban, masyarakat, dan negara sehingga asas keseimbangan

⁶ Arief Sritua, 1986, *Korupsi*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta, hal 44.

kepentingan ini mempunyai daya jangkau yang luas bagi pemenuhan rasa keadilan.

Andi Hamzah berpendapat penyebab korupsi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Patut digaris bawahi kurangnya gaji pegawai dalam hal ini jika dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat sebagai akibat kemajuan teknologi, jadi bukan kaitan antara gaji pegawai dengan kebutuhan pokoknya. Sebagai contoh, sebelum tahun 1981 banyak daerah di Indonesia yang belum dapat menikmati siaran televisi sehingga belum dibutuhkan pesawat televisi di sana, akan tetapi ketika televisi sampai ke pelosok-pelosok tanah air, kebutuhan televisi menjadi kebutuhan yang mendesak sampai ke desa-desa. Demikian juga kebutuhan lainnya terus melaju, misalnya barang-barang elektronik, *hand phone*, sepeda motor atau mobil yang pada umumnya didambakan oleh para pegawai. Semua ini menambah beban kebutuhan pegawai negeri.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan

sumber atau sebab meluasnya korupsi

3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien

Terkenal ucapan Prof. Soemitro, bahwa usaha pendidikan dan pelatihan tidak mempan bukan saja untuk memberantas korupsi, tetapi juga untuk mengurangnya.

4. Modernisasi

Modernisasi ikut mengembangkan korupsi karena korupsi membuka sumber-sumber baru, modernisasi terutama di Negara-negara yang memulai modernisasi memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

Adapun Faktor Penyebab terjadinya Korupsi menurut Evi Hartanti antara lain :

1. Lemahnya Pendidikan dan Etika
2. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para pelaku yang

memiliki intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpendang sehingga alasan ini dikatakan kurang tepat.

4. Kemiskinan

Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.

5. Tidak adanya sanksi yang keras.

6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.

7. Struktur Pemerintahan.

8. Perubahan Radikal.

Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional.

9. Keadaan masyarakat⁷.

Sementara, dalam wikipedia Indonesia disebutkan bahwa kondisi yang mendukung munculnya tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang terlihat di

rezim-rezim yang bukan demokratik.

2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
3. Kampanye-kampanye politik yang mahal.
4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar
5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman lama
6. Lemahnya ketertiban hukum
7. Lemahnya profesi hukum
8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa
9. Rakyat yang cuek, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum
10. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau suap

Menurut pendapat penulis kampanye yang mahal, lemahnya profesi hukum dan adanya pengadaan proyek dengan biaya besar adalah beberapa embrio dari kasus korupsi yang sedang *booming* saat ini, dan faktor moral sangat erat kaitannya terhadap terciptanya kasus korupsi jenis ini dengan indikator rendahnya imunitas penyelenggara negara dalam menjalankan amanah. Sudah bukan rahasia lagi jika dalam kampanye baik dalam pemilihan kepala negara, kepala daerah ataupun lembaga legislatif selalu

⁷ Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 60.

menelan biaya yang cukup besar. Walaupun pengaturan tentang dana kampanye secara tegas telah diatur dalam undang-undang tetapi masih sering kita dengar tentang *stigma* miring terkait dana kampanye, seperti terungkapnya fakta dalam persidangan di mana seorang pejabat yang diduga melakukan korupsi ternyata mengalirkan uang hasil korupsinya ke bendahara partai politik tertentu untuk mensukseskan partai politik tersebut dalam pemilu.

C. Akibat Korupsi

Penguasa pemerintah di hampir setiap negara percaya bahwa tugas utama dari setiap pemerintahan apakah dia demokratis atau otoriter adalah untuk menjamin agar negara dan bangsanya tetap hidup dan berjaya. Tumbuhnya penyalahgunaan wewenang atau *Fundamental Uncontrollability of Criminal Justice System* menimbulkan permasalahan hukum yang berakibat lanjut terhadap posisi peradilan pidana dalam lingkaran problem sosial. Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya di atas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya, korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah

kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman dan hal-hal lain menyangkut prosedur sederhana⁸.

Kasus korupsi tidak saja berdampak buruk pada diri si pelaku dan keluarganya dengan masuknya si pelaku ke penjara, tapi lebih daripada itu kasus korupsi juga berdampak pada kehidupan bernegara secara umum, seperti: ekonomi, politik, sosial, pertahanan dan keamanan. Secara detail tentang akibat dari korupsi adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.
Negara lain lebih mempercayai Negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik dalam kerjasama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan perubahan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian Negara dan stabilitas politik.
2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat

⁸ OC Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, hal 40.

Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan Negara masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintahan. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan Negara. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1998 lalu, masyarakat sudah tidak mempercayai lagi pemerintah dan menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya karena dinilai tidak lagi mengemban amanat rakyat dan melakukan berbagai tindakan yang melawan hukum menurut kacamata masyarakat.

3. Menyusutnya pendapatan Negara
Penerimaan Negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan Negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan Negara tersebut.

4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara

Keamanan dan ketahanan Negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap Negara.

5. Perusakan mental pribadi

Seseorang yang melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini akan mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi itu ditiru dan dicontoh generasi muda, apabila hal tersebut terjadi maka cita-cita bangsa untuk

mewujudkan masyarakat adil dan makmur semakin sulit untuk dicapai.

6. Hukum tidak lagi dihormati

Negara kita merupakan negara hukum di mana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Tanggung jawab pada hal ini bukan hanya terletak pada penegak hukum saja, namun juga pada seluruh warga negara Indonesia. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh masyarakat⁹.

Menurut Sritua Arief, korupsi menciptakan 4 efek negative yang telah melanda kehidupan sosial ekonomi

Pertama, berkembangnya naluri konsumtif ke seluruh lapisan masyarakat yang ditimbulkan oleh pelemparan uang panas atau pembelanjaan pendapatan gelap (*black income*) oleh para pelaku korupsi dan *demonstration effect* yang menyertainya.

Kedua, pengalihan sumber-sumber nasional ke luar negeri oleh pelaku korupsi disebabkan adanya

kekhawatiran timbulnya gejolak sosial yang *eksplosif* di dalam negeri. Ini membuat kemampuan ekonomi Negara-negara dengan pemerintahan yang korup sangat lemah dalam memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat dalam proses pembangunannya,

Ketiga, pergeseran pendapatan yang bersifat semakin *regresif* setelah memperhitungkan pendapatan dari hasil korupsi yang tidak tercatat. Pendapatan dari hasil korupsi dan penyimpangan-penyimpangan lain yang bersifat terselubung dan disembunyikan menyebabkan pendapatan ini tidak masuk dalam jaringan objek perpajakan langsung.

Keempat, penyempitan sosial dalam pemanfaatan jasa harta-harta sosial/barang dan jasa-jasa umum. Ini terjadi sebagai akibat berlangsungnya suatu proses penentuan harga barang jasa yang tidak wajar dalam masyarakat yang timbul dari adanya ketidakwajaran di segi penyediaan dan permintaan¹⁰.

D. Pencegahan Dan Penanganan Korupsi

1. Hambatan Sinergitas Antar Institusi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Tidak dapat dipungkiri bahwa KPK saat ini menjelma menjadi institusi

⁹ *Op Cit.* Hartanti, Evi, hal 32

¹⁰ *Op Cit.* Sritua Arief, hal 76

yang *Super body* dalam tugas dan fungsinya memberantas korupsi, sehingga timbul kesan keberadaan KPK seperti *memarjinalkan* keberadaan institusi lain seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pengadilan yang *notabene* juga mempunyai tugas yang sama dalam usaha pemberantasan korupsi. Terciptanya Kondisi seperti ini tidak terlepas dari ketentuan Perundang-undangan yang memang memberikan kekuasaan besar kepada KPK dalam memberantas korupsi. Dalam penjelasan umum UU No. 30/2002 memang dijelaskan bahwa KPK tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. KPK berfungsi sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang telah ada, (*trigger mechanism*), menyusun jaringan kerja (*networking*) dan memperlakukan institusi-institusi tersebut sebagai *counterpatner* dalam upaya pemberantasan korupsi. Jika ketentuan tersebut tidak diikuti ketentuan selanjutnya maka dapat dipastikan keberadaan KPK tidak ‘berbenturan’/ ‘mengkebiri’ wewenang institusi lain. Permasalahannya, bagi sebagian kalangan, kewenangan KPK seperti tercantum dalam Bab II UU No.30/2002 begitu besar, sehingga seolah-olah terjadi *takeover* dari tugas institusi lainnya khususnya kepolisian dan kejaksaan di

dalam ruang lingkup penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (disamping institusi lainnya seperti kehakiman dan pengadilan) kepada KPK terhadap penanganan tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi adalah tidak pada tempatnya karena pada sebenarnya kejaksaan masih mampu untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik. ‘Wujud kekecewaan’ terhadap sepak terjang KPK ‘disinyalir’ juga dialami oleh kepolisian saat ini. Peristiwa yang baru saja terjadi, dua orang anggota Polri yang ada dalam KPK yakni Brigjen Bambang Widaryatno (Dir. Penyidikan KPK) dan AKBP. Akhmad Wiyagus (Dir. Pengaduan masyarakat KPK) ditarik dari KPK¹¹. Terjadi silang pendapat terhadap proses penarikan ini. Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho berpendapat pemindahan dua orang tersebut merupakan pembuangan atau menyingkirkan orang-orang yang punya andil besar dalam penanganan kasus korupsi kelas kakap yang telah, sedang, dan akan ditangani KPK. Pendapat emerson didasari dengan kondisi saat itu dimana KPK sedang menangani mega

¹¹ Seputar Indonesia, 2 Juni 2008 hal 8, “mutasi anggota kpk dipertanyakan”

skandal kasus korupsi BLBI (bantuan likuiditas bank Indonesia) dimana terlibat di dalamnya keluarga terdekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Walaupun pihak kepolisian membantah dan mengatakan penarikan tersebut terkait rotasi di tubuh Polri, tetapi banyak pendapat yang muncul dan sependapat dengan Emerson bahwa penarikan tersebut merupakan upaya untuk ‘menggembosi’ KPK secara halus, sehingga KPK akan kehilangan orang-orang nya yang kompeten dan berkapasitas bagus. Dengan kehilangan anggota-anggotanya tersebut KPK pada akhirnya hanya akan menjadi Institusi yang Ompong dan mandul.

2. Tanggung Jawab Sosial

Karakteristik Kepemerintahan yang baik berdasarkan literature yang ada paling tidak memiliki 3 karakteristik utama yaitu : Transparansi (*transparency*), supremasi/penegakan hukum (*rule of law*) dan akuntabilitas (*accountability*). Proses demokratisasi politik dan pemerintahan dewasa ini tidak hanya menuntut profesionalitas serta kemampuan aparatur dalam pelayanan publik, tetapi secara fundamental menuntut terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi dan

nepotisme atau KKN¹². Fakta bahwa pelayanan publik di Indonesia belum menunjukkan kinerja yang efektif sering menjadi bahasan, baik dalam berbagai tulisan maupun penelitian permasalahan pelayanan publik yang tidak efektif ini dipicu oleh berbagai hal yang kompleks, mulai dari budaya birokrasi yang masih paternalistik, lingkungan kerja yang tidak kondusif terhadap perubahan jaman, rendahnya sistem *reward*, lemahnya mekanisme *punishment* bagi aparat birokrasi¹³.

Tanggung jawab sosial merupakan suatu konsekuensi yang sebaiknya dilakukan untuk menyangga beban sosial yang menyangkut sebagian/keseluruhan dari permasalahan maupun kerentanan yang menimpa masyarakat, termasuk tanggung jawab dalam penanganan tindak pidana korupsi sebagai manifestasi dari problem-problem sosial. Dalam kasus korupsi masyarakat mempunyai posisi yang cukup unik yakni sebagai pihak yang dirugikan (uang hasil korupsi adalah uang negara yang *notabene* juga milik rakyat/masyarakat pada umumnya) sekaligus bisa menjadi pihak pelopor terjadinya tindak pidana korupsi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 31

¹² Sedarmayanti, 2004, *Good Governance*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 24.

¹³ Lembaga Administrasi Negara, 2006, *Kajian Tentang Pola Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah*, Jakarta

Tahun 1999, yaitu sewaktu masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dasar hukum dari peran serta masyarakat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ketentuan sebagai berikut :

Pasal 108 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa setiap orang yang melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, mempunyai hak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik, baik lisan maupun tertulis. b.Pasal 108 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana, wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.

Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pembuat undang-undang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan *perlindungan hukum dan penghargaan*. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang peran serta masyarakat tersebut terdapat di dalam Pasal 41 dan Pasal 42

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pasal 41 menyebutkan: Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk : a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum

Pembenahan masalah moral membutuhkan waktu yang lama karena prosesnya yang panjang. Sesuatu yang telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh masyarakat sangat sulit jika tiba-tiba harus dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Sangat sulit sepertinya bagi bangsa ini untuk membangun moral yang baik bagi seluruh elemen bangsa. Rasa malu,

rasa takut, dan cinta pada tanah air yang merupakan bagian dari moralitas elemen bangsa sepertinya sudah hilang dari semua anak bangsa terutama para koruptor. Sebagai contoh kondisi moral koruptor di Indonesia. Saat ini sulit ditemui para koruptor yang *drop* kondisi *phsycis*-nya ketika kasus korupsi melekat pada dirinya, mereka yang rata-rata pejabat tetap tampil layaknya pejabat baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, pembacaan tuntutan, bahkan sampai di rumah tahanan fasilitas masih mereka dapatkan. Demikian juga dengan keluarganya, harta yang tidak seluruhnya disita masih dapat dinikmati untuk hidup di atas standar, dan masyarakat sebagai bagian dari *link* pembentukan moralitas terlihat apatis/cuek terhadap pelaku/keluarga koruptor. Tidak ada hukum secara adat atau apapun dan dimanapun di wilayah Republik ini yang bereaksi seperti menjauhi para koruptor dan keluarganya sebagai konsekuensi moral. Padahal peran masyarakat begitu besar dalam usaha pemberantasan korupsi.

Fenomena apatisisme ini ditangkap oleh *International Corruption Watch* (ICW), sehingga muncullah ide untuk memberikan seragam kepada tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi. ICW menganggap seragam untuk tahanan KPK

sangat diperlukan. Adapun maksud untuk memberi seragam kepada koruptor adalah untuk memberikan efek jera dan rasa malu. Mungkin jika ini bisa diterapkan, angka korupsi dapat berkurang, karena fakta yang selama ini kita lihat, para koruptor yang muncul di media massa, mereka seperti bukan koruptor yang seharusnya berpenampilan seperti pesakitan dengan ekspresi menyesal sebagai pertanggung jawabannya secara moral terhadap kejahatan yang dilakukannya bagi negara ini dengan perilakunya yang korup, tapi yang justru terjadi koruptor yang berpenampilan bak selebriti dengan pakaian mewah serta senyum dan lambaian tangan saat diminta komentar terkait kasus korupsi yang menimpa mereka.

Ada beberapa langkah terhadap peran sosiologis masyarakat dalam upaya mengatasi korupsi. Diantaranya mengubah paradigma, bahwa korupsi bukan saja masalah hukum, tetapi sistem sosial yang cacat, sehingga membentuk penyakit peradaban masyarakat manusia. ‘Selain itu, hukuman sosial harus lebih ditonjolkan daripada hukuman denda atau badan di samping perlunya rekayasa sosial guna merubah masyarakat yang korup serta perlunya merubah sistem politik dan sistem birokrasi yang korup.

Bahkan perlu adanya boikot oleh masyarakat internasional.

PENUTUP

Persoalan korupsi adalah persoalan global, artinya hampir semua negara di dunia ini tidak ada yang tidak memiliki kasus korupsi, termasuk Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia begitu memprihatinkan, hampir tidak ada satu wilayah-pun dan suatu institusi manapun yang tidak terjangkit persoalan korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti sebuah penyakit menular..

Undang-undang tindak pidana korupsi, jaksa, hakim, komisi pemberantasan korupsi, dan lembaga peradilan adalah instrumen hukum yang mempunyai peran penting dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Secara kuantitas instrumen hukum tersebut sudah representative untuk menangani tindak pidana korupsi. Tetapi dengan semakin bertambahnya kasus korupsi bisa disimpulkan bahwa kinerja dari instrumen hukum tersebut tidak berjalan efektif, sehingga perlu diagendakan untuk memperbaiki kualitas kerja dari instrumen hukum tersebut dengan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang korupsi ataupun undang-undang terkait instrumen

hukum lainnya seperti: polisi, jaksa, hakim ataupun KPK. Disamping usaha-usaha tersebut, terdapat satu hal yang patut diagendakan dalam upaya pemberantasan korupsi yakni pembenahan moral bangsa. Moral adalah dasar dari sebuah tanggung jawab, jika semua masyarakat suatu bangsa memiliki moral yang rendah maka dapat dipastikan tanggung jawab dalam kehidupannya juga rendah, termasuk tanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan yang diembannya.

Semua elemen bangsa harus bergerak bersama untuk memberantas korupsi. Produk hukum seperti undang-undang yang masih menjadi kendala efektifitas memberantas korupsi harus diperbaiki, pembinaan/peningkatan kinerja terhadap aparat penegak hukum harus terus distimulus termasuk pembinaan moral sebagai pembentuk hati nurani. Seperti patologi korupsi yang bisa menyebar, maka moralitas yang baik juga bisa menular dan memberikan aura positif untuk menarik lingkungan di sekitarnya guna melakukan hal yang sama. Produk undang-undang yang baik, aparat yang bermoral, dan masyarakat yang perduli dan peka terhadap nilai-nilai kebenaran, akan dapat mereduksi penyebaran dari patologi korupsi yang sedang menjangkit bangsa Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin., 23 Juni 2008 hal 8, *Jaksa Agung Alchemist*, Seputar Indonesia
- Alatas, Syed Hussein., 1983, *Sosiologo Korupsi*, LP3S, Jakarta
- Ali, Suryadharma., 25 Juni 2008, *Membangun Parpol Anti Korupsi*, Seputar Indonesia
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi., 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Atmasasmita, Romli., 31 Juli 2008, *Pro Kontra Komposisi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor*, Seputar Indonesia
- Hamzah, Andi., 2005, *Pemberantasan Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hartanti, Evi., 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Husein, Yunus., 11 Agustus 2008, *Baju Khusus Para Koruptor*, Seputar Indonesia
- Indriyanto, Seno Adji., 2007, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta
- Kaligis, OC., 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi*, PT. Alumni, Bandung
- Kristiana Yudhi, 2006, *Independensi Kejaksaan Dalam Penyidikan Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lembaga Administrasi Negara, 2006, *Kajian Tentang Pola Korupsi di Lingkungan Instansi Pemerintah*, Jakarta
- Mochtar, Zaenal Arifin., 7 Agustus 2008, *Ironi Pengadilan Tipikor*, Sinar Indonesia, Jakarta
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Ramelan, Prayitno., 23 Juni 2008 hal 6, *Saat Kredibilitas Terancam*, Seputar Indonesia
- Rusli, Muhammad., 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Seputar Indonesia, 2 Juni 2008 hal 8, mutasi anggota kpk dipertanyakan
- Seputar Indonesia, 23 Juli 2008, Melanggar, 18 Jaksa Diberi Sanksi
- Siagian P, Sondang., 1994, *Patologi Birokrasi*, Ghalia Indonesia
- Sritua, Arief., 1986, *Korupsi*, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Thoha, Miftah., 2003, *Birokrasi & Politik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2005, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, Cemerlang, Jakarta
- Winarno, Taufiq. 2011 Sejarah Patologi Sosial diakses 26 November 2013 dari <http://Wikipedia>.
- Wiyono, R, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta